BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada *good governance*. Dalam rangka melaksanakan TAP MPR RI nomor XI/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 maka untuk menciptakan terselenggaranya *good governance* dan upaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas serta legitimate terhadap semua kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara instansi atau organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik dengan mematuhi prinsip keterbukaan (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*) dan keperansertaan (*participative*). Kantor-kantor pemerintah, seperti departemen, atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, sangatlah diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik.

Untuk mewujudkan tujuan seperti di atas maka dan agar dapat menjangkau lapisan masyarakat secara luas serta membangun era demokratisasi dan transparansi maka diperlukan bantuan media massa yang meliputi pers dan wartawan. Dapat diambil kesimpulan bahwa media massa merupakan kepanjangan tangan suatu organisasi dalam penyebaran informasi.

Kemudian Iriantara (2008:5) juga menjelaskan bahwa hubungan baik dengan media tentunya disertai dengan harapan agar berbagai kegiatan yang dijalankan organisasi diliput media secara jujur, akurat dan berimbang. Untuk mencapai maksud tersebut maka organisasi wajib mengembangkan hubungan yang kokoh dan erat dengan media cetak, media penyiaran dan, tak kalah

pentingnya, menjalin hubungan dengan media *online*. Tujuannya agar citra positif organisasi di mata para *stakeholder*-nya bisa terus terjaga dengan baik.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden merupakan satu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan media massa.. Seperti yang dicantumkan di Pasal 97 Permensesneg Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa, Biro Pers, Media dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pers dan media, peliputan dan analisis berita, dan pengelolaan informasi, data dan dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya di dalam maupun di luar negeri, serta pengelolaan perpustakaan Kepresidenan. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Biro Pers, Media dan Informasi ini adalah fasilitator antara dan/atau Istri/Suami Presiden dengan media massa dan wartawan atau wartawan.

Di Biro Pers, Media dan Informasi itu sendiri memiliki 4 bagian yang dijadikan sebagai *media relations*, yaitu Bagian Data dan Informasi, Bagian Pers, Bagian Media dan Analisis Berita, dan Bagian Peliputan dan Dokumentasi. Masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan yang ada di Pasal 97 Permesesneg Nomor 2 Tahun 2011. Maka dari pasal tersebut dapat disimpulkan masing-masing tugas sebagai berikut, Bagian Data dan Informasi yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data mengenai sistem jaringan *online* Kepresidenan, Bagian Pers yaitu memiliki tugas untuk mengatur hubungan antara Biro Pers, Media dan Informasi dengan media massa khususnya pers atau wartawan, Bagian Media dan Analisis Berita yaitu memiliki tugas untuk melakukan *monitoring media* baik itu media cetak maupun media *online* dan menganalisis berita yang ada di berbagai media tersebut, dan Bagian Peliputan dan Dokumentasi yaitu memiliki tugas untuk melakukan peliputan dan dokumentasi mengenai semua kegiatan yang dilakukan oleh Presiden.

Karena itu peneliti memilih Biro Pers, Media dan Informasi sebagai objek penelitian mengenai strategi *media relations* yang telah dilakukan. Selain itu juga karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan golongan maka

hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk menciptakan *good governance* dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Hal ini mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai strategi *media relations* yang dilakukan untuk menciptakan *good governance*.

Berdasarkan Pasal 28 UUD 45 dalam Ardianto, Komala dan Karlinah (2009:165) yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Meskipun demikian semua pesan komunikasi dapat disampaikan tanpa menyinggung SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan). Begitu pula dengan Biro Pers, Media dan Informasi dengan strategi *media relations*-nya maka dapat membuat para pers dalam menyebarkan sebuah berita menjadi positif dan terkontrol.

Untuk dapat membangun *good governance* maka Biro Pers, Media dan Informasi di Sekretariat Presiden selain melakukan strategi *media relations* dengan menerapkan aspek-aspek utama *good governance*. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Strategi *Media Relations* untuk Membangun *Good Governance* (Studi Kasus di Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berangkat dari penjelasan yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden menerapkan aspek-aspek *good governance* dalam pelaksanaan strategi *media relations*-nya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden menerapkan aspek *good governance* dalam pelaksanaan strategi *media relations*-nya.”

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya diantaranya adalah :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini kelak diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman bagi penelitian dibidang ilmu komunikasi yang berkaitan mengenai humas khususnya humas pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan khususnya di Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden agar lebih meningkatkan kualitas humasnya sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik.

1.4.3 Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna sebagai dasar pemikiran ataupun sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang berkepentingan dan tertarik terhadap bahasan ini, guna untuk penelitian atau kepentingan lainnya.

1.5 Tahapan Penelitian

Gambar 1.1. Tahapan Penelitian

Sumber :OlahanPeneliti, 2015

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah melalui tahap sebagai berikut:

1. Mencari ide, peneliti mencari ide apa yang akan dijadikan sebagai bahan untuk diteliti.
2. Pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data untuk dijadikan bahan acuan penelitian dan memperkuat bahan penelitian.
3. Dalam pengumpulan data itu, ada data primer dan data sekunder.
4. Data primer itu terdiri dari melakukan wawancara dan observasi.
5. Data sekunder, yaitu dokumentasi dan mencari teori yang berhubungan dengan bahan penelitian.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Veteran No.17-18, Jakarta 10110.

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlangsung selama 1,5 tahun, yaitu bulan April 2014–September 2015. Berikut adalah table mengenai waktu penelitian

Tabel 1.1. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan						
	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt
Mencari Informasi (Perpustakaan)	■						
Penelitian Lapangan		■					
Wawancara Narasumber			■	■	■		
Pengumpulan Data			■	■	■		
Pengolahan Data			■	■	■	■	
Menyusun Proposal	■						
Seminar Proposal Skripsi	■						
Menyusun Skripsi	■	■	■	■	■	■	
Permohonan Sidang						■	
Sidang Skripsi							■

Sumber : Olahan Peneliti, 2015